



ANALISIS FRAMING ROBERT ENTMANT DALAM DETIK.COM DAN RADARBOGOR.ID TENTANG BERITA KECURANGAN PPDB SISTEM ZONASI DI KOTA BOGOR

Faisal Wibowo¹, Egi Abdul Mugni²

^{1,2} Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia

email: isalwibowo@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the framing of news articles on the case of cheating in the New Student Admission (PPDB) System in Bogor City, using the Robert Entman framing model. The study focuses on the news coverage of Detik.com and Radarbogor.id, with a qualitative approach and a framing analysis method. The data collection technique used was documentation, and the data validity was tested through source and theory triangulation. The analysis was based on the four elements of the Robert Entman framing model: define problems, diagnose causes, make moral judgments, and treatment recommendations. The research findings are as follows: 1). There is a pattern of framing in the news coverage of the cheating case in the PPDB zoning system in Bogor City on Detik.com and Radarbogor.id. 2). The news articles on Detik.com show the firmness of Bogor Mayor Bima Arya in addressing the cheating. 3). The news articles on Radarbogor.id depict the process of the cheating case in the PPDB zoning system in Bogor City.

Keywords: *Framing Analysis, PPDB Zoning System, Robert Entmant's Model*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *framing* pemberitaan Detik.com dan Radarbogor.id tentang kasus kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Bogor dengan analisis *framing* model Robert Entmant. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis pembingkai atau *framing*. Penelitian ini menggunakan 10 (sepuluh) berita, terdiri dari 5 (lima) berita dari Detik.com dan 5 (lima) berita dari Radarbogor.id tentang kecurangan sistem PPDB sistem zonasi di Kota Bogor. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi data teori. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan analisis *framing* model Robert Entman yang terdiri dari empat elemen, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*. Penelitian ini menunjukkan; *Pertama*, terdapat pola pembingkai kasus kecurangan PPDB sistem zonasi di Kota Bogor pada pemberitaan Detik.com dan Radarbogor.id. *Kedua*, pemberitaan Detik.com menunjukkan ketegasan Walikota Bogor Bima Arya dalam menindak kecurangan

tersebut. *Ketiga*, pemberitaan Radarbogor.id memperlihatkan proses perjalanan kasus kecurangan PPDB sistem zonasi di Kota Bogor.

Kata Kunci: Analisis Framing, PPDB Sistem Zonasi, Model Robert Entman

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, karena pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berguna untuk kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan memiliki tujuan utama yakni untuk mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa. Maka dari itu, pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem pendidikan yang ada untuk meningkatkan akses dan pemerataan mutu pendidikan agar mampu dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia demi peningkatan Sumber Daya Manusia yang bisa bersaing dengan negara lain.

Pemerintah Pusat dan Daerah wajib memberikan pelayanan yang mudah dan pelayanan yang jaminan pelayanan yang bermutu untuk keberlangsungan pendidikan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 pasal 11 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional. Upaya ini sudah berlangsung dan dilakukan Pemerintah sejak tahun 1984 sampai hari ini melalui sistem kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pendidikan adalah dengan menetapkan sistem zonasi sesuai amanat Permendikbud Nomor 14 tahun 2018, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah, dengan demikian siapa yang lebih dekat dengan sekolah ia lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut (Nurlailiyah, 2019).

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi ini bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan objektif, akuntabel, transparan, dan tidak ada diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan menyinergikan tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk memberikan kesadaran bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama (Kussetyaningsih, 2021).

Dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat terlaksana dengan nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, Pemerintah Kota Bogor menerbitkan kebijakan pendidikan terkait dengan PPDB berbasis zonasi yang tertuang dalam Keputusan Walikota Nomor 421/Kep.150-Disdik/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta Tahun Ajaran 2022/2023.

Pemerintah Kota Bogor menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB tersebut berpedoman kepada Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. PPDB di Kota Bogor diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan TK, SD, SMP dan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan bersama dewan guru, yang dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Dalam Keputusan Walikota Bogor di atas, dijelaskan bahwa kuota jalur zonasi minimal sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung, calon peserta didik yang berdomisili di Kota Bogor mendapat kuota minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen), Calon peserta didik yang berdomisili di luar wilayah Kota Bogor mendapat kuota maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah. Calon peserta didik yang berdomisili di Kota Bogor dengan kuota sebesar 90% (sembilan puluh persen), dibagi menjadi 4 (empat) zona dengan kuota sebagai berikut : a) Zona 1 mendapat kuota sebesar 65%; b) Zona 2 mendapat kuota sebesar 20%; c) Zona 3 mendapat kuota sebesar 10%; d) Zona 4 mendapat kuota sebesar 5%. Sistem zonasi ini ditentukan oleh jarak sekolah dengan keberadaan tempat tinggal calon siswa melalui *google maps* dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga, kemudian lokasi tinggal calon siswa diunggah dalam sistem PPDB *online*.

Dengan sistem PPDB online jalur zonasi ini terungkap ada sejumlah permasalahan soal kecurangan PPDB yang dilakukan oleh calon peserta didik. Detik.com mengungkapkan bahwa mulanya ada sebanyak 155 calon siswa SMP yang ditemukan melakukan kecurangan PPDB Jalur Zonasi, (Sholihin, 2023a) kemudian bertambah menjadi 297 orang yang melakukan kecurangan PPDB Jalur Zonasi berdasarkan hasil Verifikasi PPDB Kota Bogor. (Awaludin, 2023) Para calon peserta didik SMP Negeri di Kota Bogor itu melakukan kecurangan PPDB dengan melakukan manipulasi Kartu Keluarga (KK) yang dirubah alamatnya menjadi alamat yang dekat dengan sekolah yang dituju. Hal itu terungkap saat Walikota Bogor Bima Arya melakukan sampling ke beberapa lokasi calon siswa yang terdaftar dalam PPDB SMP lewat Jalur Zonasi. Terungkap, ada sejumlah rumah fiktif calon siswa SMPN di Kota Bogor yang ditemukan Bima Arya saat melakukan sidak tersebut. (Sholihin, 2023b)

Kecurangan PPDB Jalur Zonasi di Kota Bogor nampak bukan kasus yang pertama kali dilakukan. Hal serupa juga terjadi di PPDB SMP Jalur Zonasi di Kota Surabaya tahun 2019. Dimana prioritas jarak menjadi tolak ukur calon siswa dapat diterima oleh sekolah yang dituju. Sehingga, tak sedikit orang tua siswa berlomba untuk tinggal dekat dengan sekolah yang diinginkan. Bahkan, sebelum dimulai pembukaan PPDB Online, para orang tua berinisiatif untuk menggunakan KK saudara hingga nenek mereka yang berdekatan dengan sekolah tersebut. sehingga, si calon siswa ini ditempatkan pada KK saudaranya demi melancarkan masuk SMPN yang mereka inginkan (Nurlailiyah, 2019).

Selain itu, permasalahan PPBD Jalur Zonasi juga terjadi di Yogyakarta. Dimana calon siswa yang hendak masuk ke SMP Negeri melebihi hampir 100% dari kuota. Hasil penelitian pada Agustus 2019 di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa terdapat persaingan yang ketat pada 6.423 jiwa yang mendaftar ke SMP Negeri, hal ini dikarenakan daya tampung yang dimiliki sekolah negeri hanya berkisar 3.487. Keketatan ini terjadi di dua kecamatan yakni Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Gondokusuman karena ketimpangan antara jumlah penduduk usia sekolah dengan ketersediaan SMP Negeri di wilayah tersebut (Kusetyaningsih, 2021).

Permasalahan yang muncul terkait kecurangan PPDB di Kota Bogor menjadi perhatian media-media lokal dan nasional, seperti Detik.com dan Radarbogor.id. Keduanya memberitakan permasalahan tersebut sejak munculnya kecurangan hingga penentuan kebijakan Pemerintah Kota Bogor dalam mengevaluasi sistem PPDB Zonasi tersebut. Pemberitaan yang disampaikan kedua media massa tersebut memiliki unsur-unsur pembingkai makna-makna yang mampu menggiring opini publik untuk

memperhatikan secara lebih detail terhadap permasalahan pendidikan di Kota Bogor. Pemberitaan di kedua media tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Framing Robert Entman.

Entman dalam model framingnya berusaha menjelaskan bagaimana proses seleksi dan penonjolan poin-poin tertentu dari produk pemberitaan media massa, sehingga informasi yang disampaikan dari hasil framing tersebut memiliki ciri khas tertentu dari informasi versi lainnya. (Eriyanto, 2008, pp. 72–73)

Model framing berita Entman bisa dilakukan melalui empat cara, yaitu:

- a. *Define of problem*. Framing ini menggambarkan sebuah awal dari peristiwa;
- b. *Diagnose cause*. Framing ini menunjukkan penyebab sebuah peristiwa terjadi dan mengungkapkan aktor dibalik peristiwa itu;
- c. *Make moral judgement*; Framing ini membahas tentang nilai atau makna yang bisa diambil dari suatu peristiwa; dan
- d. *Treatment recommendation*; Framing ini menunjukkan penyelesaian suatu masalah atau memberikan rekomendasi atau jalan keluar dari sebuah masalah (Muhammad, Reformansyah, Pratiwi, Widiarti, & Komunikasi, 2022).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui *framing* pemberitaan Detik.com dan Radarbogor.id tentang kasus kecurangan PPDB sistem zonasi di Kota Bogor. Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan masyarakat mampu melihat secara lebih objektif dan detail permasalahan dan penyelesaian kasus kecurangan PPDB sistem zonasi di Kota Bogor. Selain itu, manfaat bagi peneliti ialah dapat menambah khazanah ilmu komunikasi, khususnya berkaitan dengan analisis framing Robert Entman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing*. Data penelitian berupa pemberitaan media daring yang dikumpulkan dari fitur pencarian Google selama periode waktu Juni – Juli 2023 mengenai kasus kecurangan PPDB di Kota Bogor. Sumber data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua media massa detik.com dan radarbogor.id tentang kecurangan PPDB di Kota Bogor sebagai data primer. Berita yang dianalisis berjumlah 10 (sepuluh), 5 (lima) dari detik.com dan 5 (lima) dari Radarbogor.id selama periode waktu Juli 2023. Detik.com dipilih karena berstatus sebagai media massa nasional yang paling banyak dikunjungi masyarakat Indonesia, sementara radarbogor.id dipilih sebagai media massa lokal yang paling banyak dikunjungi masyarakat Kota Bogor menurut situs pemeringkat Similiarweb.com.

Sementara itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data pemberitaan Detik.com dan Radarbogor.id tentang kasus kecurangan PPDB di Kota Bogor. Fokus perhatian diarahkan pada bagaimana struktur kalimat, proporsi narasumber, dan pembingkai judul dilakukan oleh masing-masing media. Berikut ini tabel tentang skema framing Robert Entman:

<i>Define Problems</i> (Mendefinisikan Masalah)	Bagaimana suatu peristiwa atau isu yang dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
--	---

<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa yang dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menyelesaikan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendeligitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Tabel 1. Skema Framing Robert Entman

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis framing Robert Entman yang terdiri dari empat elemen, sebagai berikut:

- a. *Define problem*, merupakan elemen pertama yang dapat dilihat sebagai framing. Elemen ini menekankan bagaimana suatu peristiwa dapat dipahami oleh wartawan.
- b. *Diagnose causes*, yang dimana untuk mengetahui siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa (*what*) dan siapa (*who*) yang dianggap sebagai sumber masalah.
- c. *Make moral judgement*, merupakan elemen yang digunakan untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang telah dibuat.
- d. *Treatment recommendation*, elemen ini memberikan penjelasan terkait penyelesaian yang dipilih. Penyelesaian ini sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis framing Detik.com dan Radarbogor.id di dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu: 1) Masa awal munculnya kecurangan PPDB di Kota Bogor; 2) Respon Pemerintah Kota Bogor terhadap munculnya kasus kecurangan PPDB; 3) Temuan Walikota Bogor Terkait Kecurangan PPDB; 4) Evaluasi dan Monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Berikut ini peneliti membuat tabel komparasi analisis framing Robert Entman Detik.com dan Radarbogor.id terkait pemberitaan kecurangan PPDB sistem zonasi di Kota Bogor.

No.	Unsur Framing	Detik.com	Radarbogor.id
1	<i>Define Problems</i>	Pemerintah Kota Bogor menemukan 155 Calon Siswa SMPN yang memalsukan alamat agar lolos seleksi PPDB sistem zonasi	Pemerintah Kota Bogor menemukan kecurangan tambahan menjadi 297 Calon Siswa yang memalsukan alamat agar lolos seleksi PPDB sistem zonasi
2	<i>Diagnose Cause</i>	Wali Kota Bogor melakukan sidak ke sekolah dan ke rumah	Wali Kota Bogor menegur Dinas Pendidikan dan Disdukcapil Kota Bogor akibat

		calon siswa kemudian menemukan kebenaran pemalsuan alamat calon siswa yang mengikuti seleksi PPDB sistem zonasi. Lalu siswa yang bermasalah akan dikeluarkan dari PPDB Kota Bogor.	kelalaian dalam pengawasan seleksi PPDB sistem zonasi. Selanjutnya Kepala Dinas dicopot dan Kepala Sekolah juga dirotasi.
3	<i>Make Moral Judgement</i>	Kecurangan dalam PPDB Sistem Zonasi di Kota Bogor mencederai sistem pendidikan Indonesia, jika dibiarkan maka terjadi ketidakadilan. Selain itu, hal ini menjadi perhatian juga bagi para orang tua siswa yang melanjutkan anaknya ke jenjang SMP harus melewati prosedur yang jujur dan tidak menggunakan praktik kecurangan	Bentuk kepedulian dan perhatian Walikota Bogor untuk membenahi sistem pendidikan di Kota Bogor khususnya dalam hal PPDB sistem zonasi. Ketegasan Walikota Bogor Bima Arya terhadap perangkat daerahnya, terutama Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan.
4	<i>Treatment Recommendation</i>	Pemkot Bogor melalui Disdukcapil bakal memperketat pembuatan Kartu Keluarga (KK). Selain itu, Walikota Bogor juga merotasi pejabat, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan, menonaktifkan Kepala Sekolah yang terlibat kecurangan PPDB, dan menyerahkan kasus tersebut ke Kepolisian untuk ditindak tegas berdasarkan hukum	Wali Kota Bogor bakal menerbitkan Peraturan Wali Kota khusus di tahun depan. Selain itu, Wali Kota Bogor juga menugaskan Inspektorat untuk menelusuri oknum ASN yang terlibat pelanggaran PPDB

Tabel 2. Komparasi Analisis Framing Robert Entman Detik.com dan Radarbogor.id

Pada analisis framing di pemberitaan Detik.com tentang kasus kecurangan PPDB sistem zonasi di Kota Bogor, berdasarkan model framing Entman dikelompokkan ke dalam empat fase. Fase pertama disebut *Define Problems*, dalam konteks ini Pemerintah Kota Bogor menemukan 155 Calon Siswa SMPN yang memalsukan alamat agar lolos seleksi PPDB sistem zonasi. Fase kedua yaitu *Diagnose Cause*, dimana Wali

Kota Bogor menemukan kebenaran pemalsuan alamat calon siswa yang mengikuti seleksi PPDB sistem zonasi saat melakukan sidak ke beberapa rumah calon siswa.

Ketiga, fase *Make Moral Judgement*, yakni kecurangan dalam PPDB Sistem Zonasi di Kota Bogor mencederai sistem pendidikan Indonesia, jika dibiarkan maka terjadi ketidakadilan. Selain itu, hal ini menjadi perhatian juga bagi para orang tua siswa yang melanjutkan anaknya ke jenjang SMP harus melewati prosedur yang jujur dan tidak menggunakan praktik kecurangan. Dan keempat fase *Treatment Recommendation*, yaitu Pemkot Bogor melalui Disdukcapil bakal memperketat pembuatan Kartu Keluarga (KK). Selain itu, Wali Kota Bogor juga telah merotasi pejabat terkait, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan, lalu menonaktifkan Kepala Sekolah yang terlibat kecurangan PPDB, dan menyerahkan kasus tersebut ke Kepolisian untuk ditindak tegas berdasarkan hukum.

Sementara itu, analisis framing dari media Radarbogor.id berdasarkan model framing Entman juga dibagi ke dalam empat fase. Pertama fase *Define Problems*, Radarbogor.id memfokuskan pemberitaannya kepada penambahan temuan kecurangan dari 155 Calon Siswa menjadi 297 Calon Siswa yang memalsukan alamat agar lolos seleksi PPDB sistem zonasi. Kedua fase *Diagnose Cause*. Pada fase ini media Radarbogor.id memberitakan bahwa Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor mendapatkan teguran dari Wali Kota Bogor akibat kelalaian dalam seleksi PPDB sistem zonasi.

Fase ketiga yaitu *Make Moral Judgement*, dimana Radarbogor.id memframing Wali Kota Bogor sebagai seorang pejabat publik yang memiliki kepedulian dan perhatian besar terhadap sistem pendidikan di Kota Bogor khususnya dalam hal PPDB sistem zonasi. Selain itu, Radarbogor.id juga memframing Wali Kota Bogor sebagai seorang Kepala Daerah yang memiliki ketegasan terhadap perangkat daerahnya, terutama Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Kemudian pada fase keempat yaitu *Treatment Recommendation*, Radarbogor.id memberitakan Wali Kota Bogor akan menerbitkan Peraturan Wali Kota khusus di tahun depan. Selain itu, Wali Kota Bogor juga menugaskan kepada Inspektorat untuk menelusuri oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pelanggaran PPDB sistem zonasi.

Berdasarkan penjabaran diatas, analisis framing Detik.com dan Radarbogor.id memiliki persamaan dan perbedaan dalam memberitakan kasus kecurangan PPDB sistem zonasi di Kota Bogor. Persamaan pertama ialah pola pemberitaannya yang hampir sama, seperti temuan kecurangan PPDB sistem zonasi, dimana Detik.com dan Radarbogor.id membuat masing-masing satu berita. Persamaan tersebut disebabkan karena media daring memiliki karakteristik sebagai platform informasi yang cepat dan juga beragam (Changara, 2016). Tidak adanya batasan ruang dan waktu membuat Detik.com dan Kompas.com lebih leluasa dalam memproduksi berita.

Sementara itu, letak perbedaannya terdapat pada pola pembingkai terhadap kasus kecurangan PPDB sistem zonasi di Kota Bogor. Diketahui bahwa Detik.com dan Radarbogor.id berasal dari dua perusahaan media yang berbeda, sehingga memiliki ketentuan tersendiri dalam membingkai sebuah peristiwa. Oleh karena itu, pembingkai inilah yang menentukan makna masyarakat atau publik terhadap informasi berita yang didapatkan, karena media massa berfungsi menyediakan ruang penafsiran bebas atas fakta yang terjadi di masyarakat (McQuail, 2011)

Dari empat fase framing media terhadap kasus kecurangan PPDB sistem zonasi di Kota Bogor, Detik.com dan Radarbogor.id memiliki kecenderungan untuk membingkai sosok Wali Kota Bogor Bima Arya sebagai sosok yang tegas dan peduli terhadap dunia pendidikan. Sebelum terjadinya pencopotan Kepala Sekolah dan merotasi Kepala Dinas Pendidikan, Wali Kota Bogor terlebih dahulu melakukan sidak langsung ke sekolah dan juga ke rumah calon siswa, dalam hal ini Wali Kota Bogor Bima Arya ditampilkan sebagai seorang pejabat publik yang bertindak cepat dalam merespon aduan masyarakat.

Saat fase *treatment recommendation*, Detik.Com menggunakan kata “dicopot”, dan “dirotasi”, pada judul berita untuk menegaskan bahwa Walikota Bogor Bima Arya melakukan evaluasi dengan mengganti Kepala Dinas Pendidikan dan mengganti para Kepala Sekolah. Penggunaan dua kata tersebut, masuk ke dalam prinsip “framing” pada sebuah berita (Eriyanto, 2008). Kata “dicopot” dan “dirotasi” mengisyaratkan bahwa hanya Bima Arya yang dapat merotasi para pejabat.

Dalam analisis framing model Entman terdapat istilah “pemenggalan realitas”, maksudnya adalah saat Walikota Bogor Bima Arya akan mengeluarkan siswa yang bermasalah dari PPDB dalam unsur *diagnose caused*, menjadi salah satu sumber pemberitaan. Apa yang dilakukan Detik.com dengan judul berita tersebut, merupakan upaya untuk memenggal realitas yang penting disampaikan kepada masyarakat (Eriyanto, 2008).

Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto sebagaimana dalam judul pemberitaan Detik.com akan telah menemukan indikasi kecurangan dan manipulasi PPDB sistem zonasi di Kota Bogor. Berita seperti ini membuat masyarakat tertarik untuk menyebarkan karena memenuhi unsur informasi tentang figur publik dan juga mengandung unsur kejutan (Eriyanto, 2008). Masyarakat dibuat penasaran tentang kebijakan atau langkah apa yang akan diambil oleh Walikota Bogor itu.

Sementara itu, Radarbogor.id dalam unsur *define problems* dalam framing model Entman menjelaskan bahwa Walikota Bogor Bima Arya saat menemukan banyak kecurangan, mengatakan bahwa PPDB sistem zonasi perlu dibatalkan. Unsur ini menjadi bagian yang dimunculkan agar masyarakat tahu tentang penyebab dari semua masalah yang terjadi (Eriyanto, 2008).

Praktik framing atau pemingkai pada Radarbogor.id terdapat unsur *moral judgement* pada kasus kecurangan PPDB sistem zonasi di Kota Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu memperbaiki sistem penerimaan siswa baru. Hal ini perlu didukung oleh ketegasan seorang Kepala Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat di daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis framing model Robert Entman tentang kasus kecurangan PPDB sistem zonasi di Kota Bogor pada pemberitaan di Detik.com dan Radarbogor.id dibagi menjadi empat fase, yaitu: *Pertama*, disebut *Define Problems*, yaitu Walikota Bogor Bima Arya menemukan 155 Calon Siswa SMPN yang “curang” dalam proses seleksi PPDB sistem zonasi. *Kedua*, yaitu *Diagnose Cause*, saat Wali Kota Bogor menemukan kebenaran pemalsuan alamat calon siswa yang mengikuti seleksi PPDB sistem zonasi. *Ketiga*, fase *Make Moral Judgement*, yakni kecurangan dalam PPDB Sistem Zonasi di Kota Bogor mencederai

sistem pendidikan Indonesia. Dan *keempat* fase *Treatment Recommendation*, yaitu Pemkot Bogor akan memperketat pembuatan Kartu Keluarga (KK), dan merotasi para pejabat yang berwenang.

Sementara itu, aframing dari media Radarbogor.id berdasarkan model framing Entman juga dibagi ke dalam empat fase. *Pertama* fase *Define Problems*, memfokuskan pemberitaannya kepada penambahan temuan kecurangan dari 155 Calon Siswa menjadi 297 Calon Siswa. *Kedua* fase *Diagnose Cause*, yakni memberitakan bahwa Walikota Bogor Bima Arya menegur Disdukcapil. *Ketiga* yaitu *Make Moral Judgement*, memframing Wali Kota Bogor sebagai seorang pejabat publik yang memiliki kepedulian dan perhatian besar terhadap sistem pendidikan di Kota Bogor. Dan *keempat* yaitu *Treatment Recommendation*, memberitakan Wali Kota Bogor akan menerbitkan Peraturan Wali Kota khusus di tahun depan, menugaskan Inspektorat untuk menelusuri oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kecurangan PPDB tersebut.

REFERENSI

- Awaludin, Y. (2023). Pendaftar PPDB Bermasalah di Kota Bogor Bertambah, 297 Siswa Didiskualifikasi. Retrieved from <https://www.radarbogor.id/2023/07/11/pendaftar-ppdb-bermasalah-di-kota-bogor-bertambah-297-siswa-didiskualifikasi/>
- Changara, H. (2016). *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Kedua). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eriyanto. (2008). *Konstruksi. Ideologi. dan Politik media*. (N. Huda SA, Ed.), LKis (6th ed.). Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. Retrieved from <https://www.mendeley.com/catalogue/7d49da85-3487-3654-b94a-1ed585f1a961/>
- Kusetyaningsih, R. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Sistem Zonasi Pada Jenjang Smp Negeri Di Kota Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 9(3), 243–255. <https://doi.org/10.21831/sakp.v9i3.17204>
- McQuail, D. (2011). *Teori komunikasi massa (Terjemahan)*. Jakarta: Salemba Humanika (Edisi 6).
- Muhammad, O. :, Reformansyah, A., Pratiwi, D., Widiarti, W., & Komunikasi, M. S. I. (2022). Analisis Framing Robert Entman Tentang Berita Kompas.Com Dan Detik.Com Tentang Kasus “Idi Kacung Who” Robert Entman’S Framing Analysis on Kompas.Com and Detik.Com News on “Idi Kacung Who” Case, 306–314.
- Nurlailiyah, A. (2019). 1381-4094-1-Pb, 13–22.
- Sholihin, M. (2023a). Bima Arya: 155 Calon Siswa SMP Palsukan Alamat Akan Dikeluarkan dari PPDB. Retrieved August 9, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-6814261/bima-arya-155-calon-siswa-smp-palsukan-alamat-akan-dikeluarkan-dari-ppdb>
- Sholihin, M. (2023b). Bima Arya Temukan Indikasi Kecurangan dan Manipulasi PPDB di Kota Bogor. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-6809950/bima-arya-temukan-indikasi-kecurangan-dan-manipulasi-ppdb-di-kota-bogor>